



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2014



BAPPEDA PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bappeda kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2014. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Bappeda untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi NTB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan laporan yang akuntabel kepada masyarakat NTB, Bappeda akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang mumpuni agar kepercayaan publik terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja semakin meningkat.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Bappeda Provinsi NTB dimasa mendatang.

Mataram, Januari 2015

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

CHAIRUL MAHSUL
NIP. 195910021985031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	Hal. 1
A. Aspek Strategis Bappeda Provinsi NTB	Hal. 1
B. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi	Hal. 2
C. Isu Strategis Bappeda Provinsi NTB	Hal. 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Hal. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal. 15
A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB	Hal. 15
B. Realisasi Anggaran	Hal. 27
BAB IV PENUTUP	Hal. 29
LAMPIRAN	
Rencana Kinerja Tahunan 2014	
Penetapan Kinerja tahun 2014	
Pengukuran Kinerja	
Pencapaian Kinerja	
Laporan Pendukung LAKIP 2014	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2014	Hal. 12
Tabel 3.1	Pelaksanaan Program GEN Tahun 2014 di Provinsi NTB	Hal. 19
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2014	Hal. 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB Perkapita ADHB (tanpa sector pertambangan) Tahun 2010 - 2013	Hal. 16
Gambar 3.2	Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2012 – 2014	Hal. 23
Gambar 3.3	Launching Bale Ite oleh Bapak Gubernur NTB	Hal. 24
Gambar 3.4	Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah/JFP di Provinsi NTB	Hal. 26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014, merupakan gambaran dari capaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang tahun laporan yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, Bappeda telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan prioritas. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke lima sasaran tersebut telah dapat dipenuhi walaupun dilihat pada tingkat pencapaian keuangan hanya mencapai 92.69%.

Sasaran pertama adalah mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui konsistensi antara dokumen perencanaan program/kegiatan dan implementasi program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana. Dicapai melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, serta Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Sasaran kedua adalah mewujudkan rencana, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang serasi, selaras dan produktif. Dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam memberikan bahan masukan guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran keempat adalah tersedianya data dan layanan informasi daerah yang aktual, akurat dan relevan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana. Dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Sasaran kelima adalah tersedianya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Hasil capaian kinerja baik yang telah mencapai 100% maupun yang belum, lebih memotivasi Bappeda untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB. Dari hasil pengukuran kinerja untuk pelaksanaan tahun 2014 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, meskipun dirasakan masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Diantaranya, terbatasnya personil yang memenuhi syarat kualifikasi, belum sinkronnya data pembangunan daerah, dan perencanaan yang masih bersifat sektoral.

Meskipun menghadapi kendala - kendala tersebut, Bappeda Provinsi NTB tetap secara maksimal berusaha mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2014. Hal ini tidak saja karena telah memanfaatkan sarana/prasarana yang tersedia secara maksimal dan anggaran yang telah disediakan, namun juga didukung oleh etos kerja melalui pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Aspek Strategis Bappeda Provinsi NTB

Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan segala keputusan yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan memperhatikan variabel – variabel yang dianggap penting. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat kompleks dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, artinya semua bidang perencanaan pembangunan ditangani di bawah Bappeda, termasuk perencanaan pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur daerah.

Pembentukan Bappeda Provinsi NTB berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana dalam peraturan tersebut dijabarkan bahwa Bappeda memiliki peran dalam :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi NTB memiliki aspek strategis dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan. Bappeda juga bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah – masalah pembangunan sekarang dan dimasa mendatang dengan mengacu pada RPJMD Provinsi NTB serta memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memudahkan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda didukung dengan adanya peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan baik dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bappeda didukung oleh 112 pegawai negeri sipil dan 11 orang pegawai non PNS, termasuk 5 orang pejabat fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis dengan tingkat pendidikan yang beragam. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Bappeda Provinsi NTB satu orang pegawai saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di Selandia Baru dan 4 orang mengambil program Master baik di dalam maupun di luar negeri seluruhnya melalui program beasiswa. Dari segi kualitas, Bappeda memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Secara administratif Bappeda berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Bappeda Provinsi NTB adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pembangunan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rincian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB dijabarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda Provinsi NTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dibidang perencanaan pembangunan

daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
- b. Pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Bappeda Provinsi;
- c. Penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
- e. Penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan sarana dan prasarana Badan pada unit kerjanya;
- h. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bappeda.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Program dan Pelaporan

Tugas pokok Subbagian Program dan Pelaporan adalah menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan

analisis data, evaluasi program dan pelaporan. Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program, dan pelaporan;
- Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah:

- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Bappeda. Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- Melaksanakan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan perlengkapan;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan, serta kelautan dan perikanan. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah – langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi :

a. Subbidang Pertanian dan Kelautan

Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Pertanian dan Kelautan yaitu:

- Menyusun rencana/program kerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
- Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dibidang pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Industri dan Keuangan

Subbidang Industri dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Industri dan Keuangan terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha;
- o Koordinasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang industri dan keuangan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, yang disusun oleh SKPD satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi perencanaan tata ruang dan wilayah;
- e. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah,

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana membawahi 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana. Rincian tugas masing-masing subbidang adalah sebagai berikut:

a. Subbidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah meliputi :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang Prasarana Wilayah;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang dan sumber daya alam serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam adalah sebagai berikut :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan sosial yang meliputi bidang perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan olahraga, diklat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan dan program ketertiban, pengawasan serta tugas – tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan yaitu:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pemerintahan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan olahraga, kesejahteraan sosial dan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan, penyusunan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi dan statistik serta dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah. Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. Penyusunan rencana kerjasama pembangunan lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pengembangan Perencanaan

Subbidang Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan perencanaan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitoring dan

laporan pelaksanaan pembangunan daerah serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan, pengumpulan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi serta dokumentasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja pembangunan lintas provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan provinsi guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pengumpulan, penyusunan dokumentasi dan peragaan data statistik hasil pembangunan.

Bidang Statistik terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pendataan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Pelayanan Informasi

Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik menjadi bahan informasi, pengelolaan pusat data provinsi dengan memanfaatkan teknologi informatika guna mendukung perencanaan selanjutnya serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari:

- Menyusun rencana/program kerja;
- Monitoring dan evaluasi dibidang Pelayanan Informasi;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Isu Strategis Bappeda Provinsi NTB

Dalam melaksanakan tugas pada bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menghadapi berbagai macam masalah yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugasnya.

Isu strategis tersebut antara lain :

- Kuantitas dan kualitas pelayanan apartur belum optimal
- Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat
- Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan
- Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah
- Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat
- Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
- Rencana pembangunan berbasis tata ruang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditanda tangani Kepala Bappeda Provinsi NTB dengan Gubernur NTB, Bappeda menetapkan 5 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja berdasarkan rancangan Rencana Strategis yang pada saat itu baru saja disusun sebelum diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dimana RPJMD ini ditetapkan pada bulan Februari 2014. Sehingga bila dibandingkan antara Renstra Bappeda sebelum dan setelah diselaraskan terdapat beberapa perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang cukup signifikan. Akan tetapi karena penyusunan Penetapan Kinerja masih berdasarkan rancangan Renstra, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB akan menyajikan data sesuai dengan yang telah direncanakan dalam PK tahun 2014.

Adapun sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam PK Bappeda tahun 2014 adalah :

- Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui konsistensi antara dokumen perencanaan program/kegiatan dan implementasi program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana;
- Mewujudkan rencana, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang serasi, selaras dan produktif;
- Terwujudnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam memberikan bahan masukan guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- Tersedianya data dan layanan informasi daerah yang aktual, akurat dan relevan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana;
- Tersedianya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan rincian indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perencanaan Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui	Jumlah dokumen data statistik pembangunan	9 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
konsistensi antara dokumen perencanaan program/kegiatan dan implementasi program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana.	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB (tanpa sektor pertambangan)	Rp. 11,302,611
	Jumlah dokumen usulan program/kegiatan partisipatif	3 dokumen
	Jumlah dokumen rancangan RKPD	2 dokumen
	Jumlah dokumen RKPD hasil Musrenbang	1 dokumen
	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disusun	4 dokumen
	Jumlah dokumen pedoman perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	1 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesra	2 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	1 dokumen
Mewujudkan rencana, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang serasi, selaras dan produktif	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan sumber daya alam	4 dokumen
	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	1 dokumen
Terwujudnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam memberikan bahan masukan guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen
	Jumlah dokumen LKPJ	1 Dokumen
	Jumlah buku hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pembangunan di Prov. NTB yang dicetak	2 dokumen
	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan	1 dokumen
Tersedianya data dan layanan informasi daerah yang aktual, akurat dan relevan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial,	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan neraca keuangan yang tersedia	1 dokumen
	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi pembangunan yang dilakukan	1 kegiatan
	Jumlah dokumen profile daerah berupa peta sosial berbasis WEB yang disusun	1 dokumen
	Jumlah kegiatan publikasi hasil-hasil pembangunan daerah	1 kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
tata ruang dan prasarana	Jumlah Dokumen RPJMD Provinsi NTB dan RKPD Online	2 dokumen
Tersedianya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SDM Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang memadai	32 orang
	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang dilaksanakan	1 kegiatan
	Jumlah aparatur yang diberikan pembinaan mental dan fisik	150 orang

Untuk mewujudkan sasaran strategis dengan seluruh indikator kinerja diatas, Bappeda Provinsi NTB melaksanakan 8 program prioritas dan 25 kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.333.886.500,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB

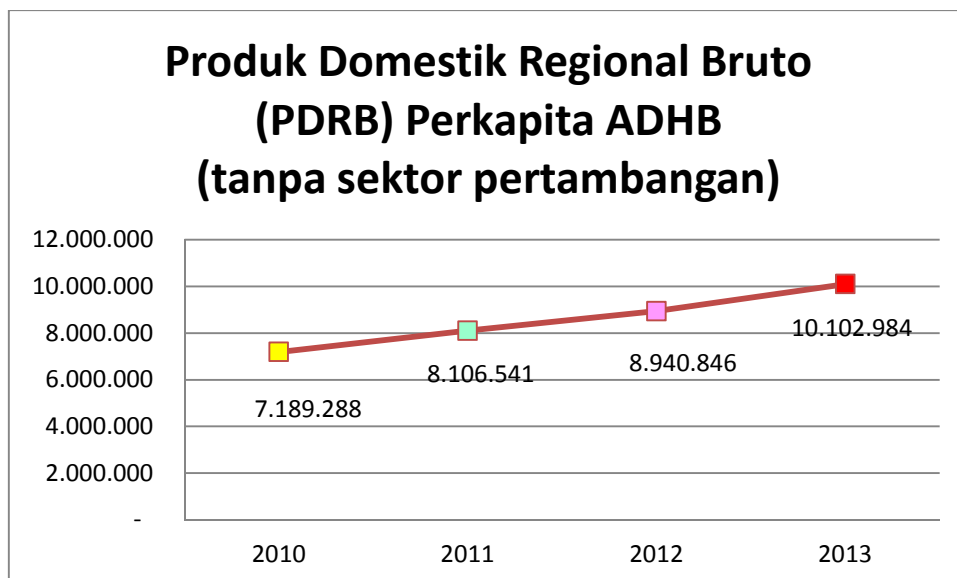
Sasaran I : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui konsistensi antara dokumen perencanaan program/kegiatan dan implementasi program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana.

Untuk menyediakan data dasar bagi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menyediakan dokumen data statistik pembangunan bekerjasama dengan BPS Provinsi NTB menyusun buku Nusa Tenggara Dalam Angka Tahun 2013 dan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB Tahun 2013. Dari 9 target dokumen yang ditetapkan akan disusun pada tahun 2014, seluruhnya dapat tercapai. Karena selain kedua dokumen diatas terdapat beberapa dokumen yang juga disusun, antara lain :

- a. Tabel Input-Output Provinsi NTB Tahun 2014
- b. Indeks Pembangunan Regional Provinsi NTB Tahun 2013
- c. Analisis Distribusi Pendapatan Provinsi NTB Tahun 2013
- d. Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013
- e. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB tahun 2013
- f. Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB Tahun 2013
- g. Kajian Nilai Tukar Petani di Provinsi NTB Tahun 2013.

Pada tahun 2009 sampai dengan 2013, salah satu indicator kinerja utama Bappeda adalah PDRB Perkapita ADHB (tanpa sector pertambangan) dan sampai disusunnya PK tahun 2014 belum ada penggantian IKU hingga RPJMD 2013 – 2018 ditetapkan pada Februari tahun 2014. Sehingga PDRB, pada saat itu masih dijadikan IKU Bappeda Provinsi NTB. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh BPS, PDRB Perkapita ADHB (tanpa sector pertambangan) Provinsi NTB tahun 2013 sebesar Rp. 10.102.984,-. Sedangkan PDRB tahun 2014 akan dirilis pada pertengahan tahun 2015. Setiap tahunnya PDRB perkapita Provinsi NTB mengalami peningkatan, dan kenaikan cukup signifikan terjadi antara tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp. 1.162.138,-. Secara lebih rinci perkembangan PDRB Perkapita tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.1
PDRB Perkapita ADHB (tanpa sector pertambangan)
Tahun 2010 - 2013



Untuk mensinkronisasikan perencanaan setiap tahunnya Bappeda melakukan Rapat Kerja Kepala Bappeda se-Provinsi NTB, Forum SKPD, Pra Musrenbang berbasis kewilayahan serta Musrenbang Provinsi. Rapat kerja kepala bappeda merupakan inisiatif yang dilakukan untuk menyerap aspirasi pembangunan secara *bottom up* lebih dini karena dilaksanakan diawal tahun serta untuk menyamakan persepsi kebijakan pembangunan antara provinsi dengan Kabupaten/Kota. Tahun 2014 Rapat Kerja Kepala Bappeda dilaksanakan juga pada akhir tahun dan didahului dengan Rapat Kerja Sekretaris Bappeda se – NTB, dimana pada tahun – tahun sebelumnya hal ini belum pernah dilakukan. Dengan demikian target dokumen usulan program/kegiatan partisipatif yang ditetapkan sebanyak 3 dokumen berhasil tercapai yaitu dengan tersusunnya laporan hasil Rapat Kerja Bappeda Kabupaten/Kota se NTB, hasil Forum SKPD Provinsi NTB dan hasil Pra Musrenbang Provinsi NTB.

Selain itu, pada tahun 2014 telah diadakan Bimbingan Teknis tentang proses penyusunan LAKIP SKPD dengan mengundang narasumber dari pihak Kementerian PAN dan RB, Biro Organisasi Provinsi NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Peserta bimtek ini berjumlah 75 orang, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas LAKIP SKPD sehingga dapat menyajikan data secara relevan sesuai skema yang ada. Selain itu, Bappeda juga mengadakan workshop pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta. Peserta berjumlah 90 orang terdiri dari perwakilan seluruh SKPD Provinsi NTB, Bappeda Kabupaten/Kota dan LSM dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB tahun 2014 dihadiri oleh 650 orang peserta dengan proporsi jumlah peserta dari masyarakat sebesar 39% dan 61% dari unsur pemerintahan. Output kegiatan ini adalah tersusunnya sebuah dokumen RKPD hasil Musrenbang tahun 2015, dimana target tersebut tercapai sesuai harapan. Dokumen ini juga digunakan sebagai bahan untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Nasional yang dilaksanakan oleh Bappenas.

Target indicator kinerja untuk dokumen rancangan RKPD sejumlah 2 dokumen hanya berhasil tercapai 1 (satu) dokumen dan dicetak sebanyak 75 buku, karena penyusunan RKPD pada tahun 2014 dilaksanakan secara online sehingga pembuatan software dilakukan pada mata kegiatan lainnya yang terdapat pada sasaran IV.

Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang ditargetkan sebanyak 2 dokumen di tahun 2014, berhasil tercapai sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu Dokumen KUA Perubahan TA 2014, Dokumen PPAS Perubahan TA 2014, Dokumen KUA TA 2015 dan Dokumen PPAS TA 2015. Seluruh dokumen tersebut masing – masing dicetak sebanyak 225 buku yang berupa 75 buku draft awal, 75 buku draft akhir, dan 75 buku dokumen final.

Pada indikator dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 5 target dokumen yang ditetapkan berhasil tercapai. Dokumen perencanaan tersebut berupa :

- a. Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB tahun 2014
- b. Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015
- c. DPPA Bappeda Provinsi NTB tahun anggaran 2014
- d. DPA Bappeda Provinsi NTB tahun anggaran 2015
- e. Dokumen Penyelarasan RPJMD 2013 - 2018 dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.

Pada bidang perencanaan pembangunan ekonomi, terdapat dua indikator kinerja yang mendukung sasaran I. Indikator kinerja tersebut adalah dokumen perencanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disusun dengan target sebanyak 4 dokumen dan dokumen pedoman perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang targetnya 3 dokumen. Untuk indicator pertama, keseluruhan target berhasil tercapai dengan dicetaknya dokumen – dokumen :

- a. Buku saku database bidang Ekonomi
- b. Booklet Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

d. Laporan tahunan DBHCHT Provinsi NTB

Sedangkan indikator kedua juga berhasil tercapai, yaitu disusunnya 3 dokumen yang antara lain mengenai :

- a. Database indikator capaian target MDGS di Provinsi NTB
- b. Laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB
- c. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi NTB 2014 - 2018

Indikator dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dengan target 1 (satu) dokumen di tahun 2014 tidak berhasil tercapai karena dilakukannya rasionalisasi anggaran. Sehingga pada tahun tersebut sub bidang yang melaksanakan kegiatan ini hanya melakukan rapat koordinasi bidang pemerintahan dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang, rapat koordinasi ini dilakukan dalam beberapa tahap untuk mensinkronisasikan program/kegiatan yang dilaksanakan dibawah koordinasi sub bidang tersebut.

Untuk mewujudkan percepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, Clean Government dan Reformasi Birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sebagai langkah awal setelah dilaunchingnya Pergub AD-PPK maka pada tanggal 4 Pebruari 2014 diadakan sosialisasi kepada para pemangku kebijakan lingkup propinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, bekerjasama dengan KPK, PKK dan AIPJ, Bappeda mengadakan sosialisasi tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang kepada unsur – unsur Organisasi Perempuan di NTB.

Adapun indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan 2 (dua) dokumen hanya berhasil mencapai 1 (satu) target dokumen yaitu Dokumen Evaluasi Kinerja Gerakan 3A yang dicetak sebanyak 10 buku. Karena pada tahun ini konsentrasi kegiatan dilakukan untuk memperkenalkan program Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR) kepada masyarakat NTB yang dilaksanakan melalui workshop kepada 100 orang peserta dan program Workshop Program Bersih Lingkungan dan Sanitasi (BERLIAN) kepada 60 orang peserta.

Program ASHAR merupakan bagian dari program prioritas yang disebut Generasi Emas NTB 2015. Program ini dimulai sejak tahun 2013 dan akan berakhir tahun 2025 dengan tujuan lahirnya generasi unggul dari Provinsi NTB diawali melalui remaja putri yang harus dibekali dengan keterampilan untuk hidup sehat, sehingga ketika memasuki gerbang keluarga ia sudah siap untuk hamil dan melahirkan anak yang sehat dan cerdas. Langkah pelaksanaan program GEN di tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Pelaksanaan Program GEN Tahun 2014 di Provinsi NTB

Sumber Biaya APBD Provinsi	Sumber Biaya GCC Kanada
Penguatan Tim Koordinasi GEN (SK Gubernur, Februari 2014) dan pembentukan Sekretariat GEN	Formatif research di 2 Kabupaten (LOTENG dan LOTIM)
Workshop untuk menyusun konsep GEN, Pemantapan PUP dan PAUD.	Penyusunan Kurikulum PARANA, PAUD, Data dan Koperasi → cetak buku
Sosialisasi GEN di Kabupaten / Kota se-Pulau Lombok	Pengadaan peralatan survey
Rapat-rapat teknis untuk menyusun kurikulum PARANA, PAUD, Data dan Koperasi.	Biaya Konsultan dan Tim Lapangan.
Pengadaan peralatan, bahan untuk Sekretariat GEN	
Monev kegiatan di 2 Kabupaten contoh (LOTENG dan LOTIM)	

Sedangkan indicator jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dengan target 1 (satu) dokumen berhasil tercapai melebihi target dengan disusunnya 2 dokumen laporan hasil rapat koordinasi perencanaan prasarana serta koordinasi perumahan dan sanitasi, dengan jumlah peserta rapat tersebut masing – masing 300 orang.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018 yang ditetapkan pada bulan Februari tahun 2014, Bappeda memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data) dan dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional. Jumlah masyarakat yang mengakses RKPD Online dan NTB Satu Data sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 25.096 orang, jauh melampaui target sebanyak yang berjumlah 10.000 orang.

Untuk dokumen perencanaan, pada tahun 2014 Bappeda Provinsi NTB berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara yang merupakan Penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berprestasi di bidang dokumen perencanaan pembangunan dengan penilaian meliputi :

1. Konsistensi perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah
2. Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

3. Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan.

Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik III Kategori B yaitu bagi daerah yang memiliki criteria sumberdaya yang belum optimal, tetapi memiliki kemampuan potensial untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Ditahun yang sama Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan MDGs yang secara langsung diserahkan kepada Gubernur NTB oleh Presiden RI, yakni pada kategori sebagai berikut :

1. Terbaik I pada kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2011-2013 (Diberikan kepada 3 provinsi terbaik yang menunjukkan laju pencapaian MDGs yang tinggi pada tahun 2011-2013)
2. Peraih Penghargaan MDGs Untuk Provinsi Terbaik Dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak 2011-2013 (Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perbaikan 10 dari 12 indikator yang dinilai)

Penghargaan tersebut diberikan atas dasar pencapaian 12 indikator sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2. Indeks kedalaman kemiskinan
3. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (<1400 kkal/kapita/hari)
4. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah (SMP/MTs)
5. Rasio APM perempuan/laki di sekolah menengah
6. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
7. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
8. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
9. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49, cara modern
10. Case Detection Rate Tuberculosis
11. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Sasaran II : Mewujudkan rencana, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang serasi, selaras dan produktif.

Koordinasi perencanaan tata ruang dan sumber daya alam (SDA) dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan, karena antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota harus memiliki keselarasan dalam perencanaan pemanfaatan tata ruang yang ada agar tidak terjadi konflik

kepentingan antara para stakeholder. Pada tahun 2014 Bappeda menyusun 5 dokumen perencanaan melebihi 4 target dokumen yang telah ditetapkan pada indicator jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan sumber daya alam. Dokumen yang disusun tersebut antara lain :

- a. Dokumen kajian evaluasi Perda RTRW Provinsi NTB
- b. Dokumen KLHS KSP Agropolitan Alas Utan
- c. Dokumen Album Peta KSP Agropolitan Alas Utan
- d. Dokumen identifikasi bahan - bahan penyusunan Dossier Geopark Nasional Tambora
- e. Dokumen finalisasi Dossier Geopark Rinjani menuju Geopark Dunia.

Pemerintah Provinsi NTB bersama empat pemerintah kabupaten di Pulau Lombok, saat ini dalam proses merampungkan berbagai persyaratan pengajuan usulan Taman Nasional Rinjani untuk ditetapkan menjadi taman bumi atau geopark dunia. Untuk itu sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, Bappeda melakukan sosialisasi Geopark Rinjani menuju Geopark Dunia kepada masyarakat setempat dengan menyebarkan 500 lembar leaflet dan 500 buku saku mengenai Geopark Rinjani. Serta mengadakan seminar kepada 75 orang peserta untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan Rinjani dan sosialisasi kepada 150 orang masyarakat dikawasan sekitar Taman Nasional Rinjani. Selain itu, Pemda Provinsi NTB juga berusaha untuk mewujudkan kawasan Tambora sebagai Taman Nasional dengan langkah awal melakukan workshop kepada 100 orang peserta mengenai Tambora sebagai Taman Nasional.

Indikator kinerja jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian WISMP II sebagai perwujudan untuk menjaga kelestarian sumber daya air dengan target 1 (satu) dokumen, berhasil tercapai berupa disusunnya sebuah dokumen profil KPI dan Succes Story WISMP II. Selain itu, kegiatan tahun 2014 yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan kepada 50 orang Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program WISMP II dan melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan 40 orang peserta. Pembinaan dan pengendalian Water Irrigation System Management Project II dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan irigasi.

Sasaran III : Terwujudnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam memberikan bahan masukan guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2013 yang dituangkan kedalam satu dokumen laporan dan diserahkan pada bulan Januari tahun berikutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas sepanjang tahun 2013. Sehingga target indicator jumlah dokumen LAKIP sebanyak 1 (satu) dokumen tersebut berhasil tercapai.

Target indikator dokumen LKPJ dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen merupakan implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Penyampaian LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran yang disusun oleh Bappeda Provinsi NTB dan dituangkan kedalam sebuah dokumen, dimaksudkan untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB, dan sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun anggaran berikutnya. Target tersebut berhasil tercapai, dan dokumen LKPJ diserahkan kepada Gubernur NTB oleh tim penyusun pada bulan Maret tahun 2014.

Sedangkan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pembangunan di Provinsi NTB tahun 2014 dituangkan kedalam 3 jenis dokumen yang dicetak sebanyak masing – masing 60 eksemplar berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) dokumen. Dokumen tersebut antara lain :

- a. Dokumen Evaluasi UKP-PPP Tahun 2014 (4 triwulan)
- b. Dokumen Evaluasi Capaian Program Prioritas RPJMD 2013 - 2018 Semester I dan II
- c. Dokumen Progress Report Kinerja Program Unggulan NTB Semester II Tahun 2013 dan Kinerja RPJMD NTB 2014 - 2018 (Triwulan I,II,III Tahun 2014)

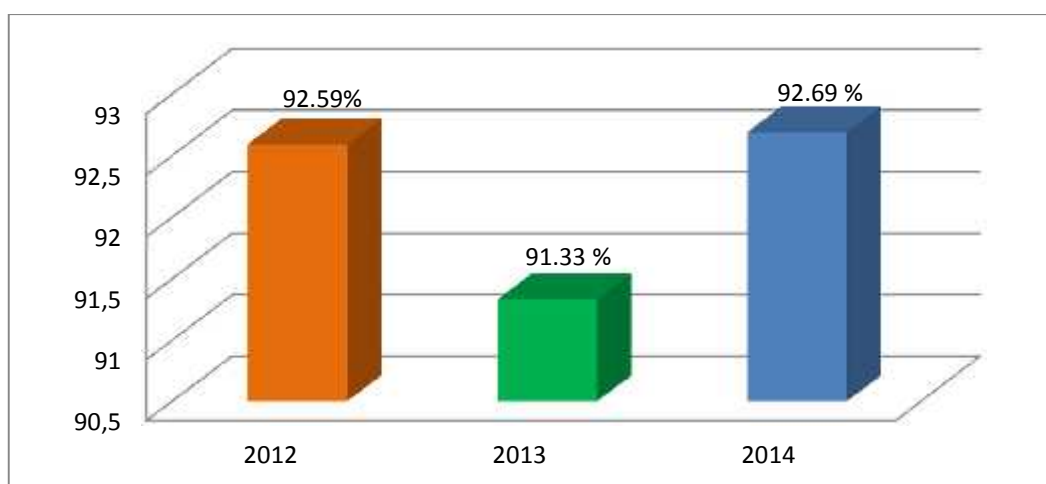
Untuk evaluasi dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda melakukan penyelarasan Renstra seluruh SKPD dengan RPJMD Provinsi NTB agar perencanaan pembangunan yang dilaksanakan masing – masing SKPD berjalan selaras dengan yang telah direncanakan

Pemerintah Daerah untuk mencapai 31 indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2013 – 2018. Sehingga dari target 1 (satu) dokumen yang telah ditetapkan berhasil tercapai 44 dokumen penyelarasan Renstra SKPD ditambah dengan 3 dokumen RPJMD dari 3 Kabupaten/Kota di NTB.

Sasaran IV : Tersedianya data dan layanan informasi daerah yang aktual, akurat dan relevan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana.

Sebagai bentuk pelaksanaan *good governance* dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Bappeda NTB mendorong keterbukaan sistem pelaporan keuangan yang ditampilkan secara factual dan real time. Sehingga demi mendukung transparansi dan percepatan realisasi keuangan pada lingkup Bappeda Provinsi NTB, Bappeda memasang TV monitor yang menampilkan realisasi keuangan dan fisik bappeda day by day dan agenda kegiatan harian Bappeda yang dilaksanakan didalam maupun luar kantor. Pada tahun 2014 serapan keuangan di Bappeda mencapai 92.69% sebagaimana tertuang dalam dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai dengan target jumlah laporan keuangan akhir tahun dan neraca keuangan sebanyak 1 (satu) dokumen. Serapan ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2013 yang berjumlah 91.33% dan tahun 2012 dengan jumlah realisasi 92.59% sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini.

Gambar 3.2
Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2012 – 2014



Untuk indicator kegiatan pengumpulan data dan informasi pembangunan yang dilakukan, Bappeda melakukan penyusunan sebuah dokumen peta tematik Kawasan Strategis Provinsi Rasimas dalam satu kegiatan serta melaksanakan pameran dalam rangka HUT Provinsi NTB. Sehingga target 1 (satu) kegiatan pada indicator ini berhasil tercapai dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan peta tematik diatas.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik, proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Menyadari hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah melalui Bappeda Provinsi NTB telah mencanangkan program “NTB SATU DATA” yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, dan sebagai realisasi dari program unggulan tersebut pada tanggal 10 September 2014 dilakukan peresmian Gedung Pusat Data Daerah Provinsi NTB “BALE ITE” (Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi) oleh Gubernur NTB.

Gambar 3.3

Launching Bale Ite oleh Bapak Gubernur NTB



Untuk mencapai indicator penyusunan dokumen profile daerah berupa peta sosial berbasis WEB, Bappeda telah menyusun peta tematik peta sosial 10 desa berbasis WEB di Provinsi NTB yang dituangkan kedalam sebuah dokumen. Sehingga indicator tersebut berhasil mencapai target sesuai harapan.

Sebagaimana ditetapkan indikator kegiatan publikasi hasil – hasil pembangunan daerah dengan target sebanyak 1 (satu) kegiatan, Bappeda telah melaksanakan publikasi terhadap hasil pembangunan yang dilakukan di NTB melalui media cetak Lombok Post yang pada tahun 2014 dilakukan sebanyak 1 kali/kegiatan serta dengan memasang spanduk dan baliho kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Bappeda Provinsi NTB.

Adapun untuk mencapai target indikator jumlah dokumen RPJMD Provinsi NTB dan RKPD Online dengan target sebanyak 2 (dua) dokumen, pada bulan Februari 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, sehingga penyusunan dokumen Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD harus mengacu pada RPJMD yang berlaku. Target indikator ini berhasil tercapai, dan RPJMD tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota se NTB dengan jumlah peserta 20 orang dan kepada 60 orang perwakilan dari SKPD Provinsi serta masyarakat.

Sedangkan untuk mengembangkan system informasi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda membuat sebuah software perencanaan yang disebut RKPD Online sehingga proses perencanaan pembangunan kedepannya akan berbasis teknologi informasi dan data dapat diupdate secara factual oleh masing – masing SKPD di Provinsi NTB. RKPD Online adalah inovasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang mencoba menggabungkan keinginan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan mengolahnya menjadi rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat, dunia usaha, Pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi dapat bersama-sama terlibat secara aktif dalam proses perencanaan.

Sasaran V : Tersedianya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai indikator SDM Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang memadai dengan target sebanyak 32 orang, Bappeda berhasil membina 45 orang JFP melebihi target yang ada. Dengan melaksanakan rapat koordinasi regional JFP di NTB dengan jumlah peserta 100 orang serta rapat kerja nasional Asosiasi Perencana Pemerintah/JFP dengan jumlah peserta 75 orang dan pada tingkat provinsi sendiri dilaksanakan rapat kerja JFP Provinsi NTB dengan jumlah peserta 45 orang.

Gambar 3.4

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah/JFP di Provinsi NTB



Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bappeda didukung oleh 133 orang pegawai baik PNS maupun Non PNS dengan berbagai kualifikasi pendidikan. Seluruh pegawai tersebut setiap bulannya diberikan pembinaan mental dan fisik baik melalui kegiatan keagamaan yang diadakan setiap hari Jumat ataupun kegiatan olahraga yang dilakukan dilingkungan kantor sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Bappeda Provinsi NTB secara keseluruhan mencapai 92,69% atau sebesar Rp. 21.267.923.513,- dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2014 Rp. 22.945.459.600,-. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.611.573.100,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.333.886.500,-, dengan realisasi masing – masing sebesar Rp. 7.234.997.556,- (95,05%) dan Rp. 14.032.925.957,- (91,52%). Sesuai dengan PK tahun 2014, realisasi untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2014

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	2014 (Murni)	2014 (Perubahan)	2014	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245,090,000	198,590,000	142,281,500	71.65
1 Pendidikan dan pelatihan formal	138,500,000	172,000,000	129,516,600	75.3
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	88,790,000	8,790,000	6,284,900	71.5
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur	17,800,000	17,800,000	6,480,000	36.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	20,000,000	19,459,050	97.3
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,000,000	20,000,000	19,459,050	97.3
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	422,000,000	368,400,000	255,764,500	69.43
1 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	223,000,000	203,000,000	141,883,950	69.89
5 Penyusunan Profile Daerah	165,400,000	165,400,000	113,880,550	68.85
Program kerjasama pembangunan	1,315,402,072	1,289,002,072	1,288,024,900	99.92
3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1,269,002,072	1,289,002,072	1,288,024,900	99.92
Program perencanaan pembangunan daerah	3,764,523,051	3,651,511,601	3,408,483,115	93.34
1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1,033,146,306	1,108,606,050	993,094,500	89.58
8 Penyusunan Rancangan RKPD	217,867,500	238,382,500	235,288,400	98.7
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	870,279,800	712,209,000	676,998,400	95.06
11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35,600,000	35,600,000	35,546,000	99.85
12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	195,500,000	195,500,000	184,248,000	94.24
13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	304,405,000	304,405,000	273,710,900	89.92

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	2014 (Murni)	2014 (Perubahan)	2014	%
14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	186,877,000	186,877,000	184,801,200	98.89
15 Penyusunan Dokumen Perencanaan	302,387,045	335,272,651	333,371,215	99.43
16 Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60,500,000	60,500,000	29,895,000	49.41
21 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	349,210,400	316,695,400	308,400,500	97.38
22 Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	145,464,000	157,464,000	153,129,000	97.25
Program perencanaan pembangunan ekonomi	695,187,198	615,187,198	602,582,350	97.95
3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	283,131,312	283,131,312	279,574,450	98.74
4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	332,055,886	332,055,886	323,007,900	97.28
Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	714,814,000	634,814,000	559,624,800	88.16
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	161,444,054	161,444,054	134,564,350	83.35
8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	473,369,946	473,369,946	425,060,450	89.79
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2,411,571,179	2,381,621,179	2,242,684,409	94.17
7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	207,528,000	207,528,000	204,734,493	98.65
8 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	1,234,629,379	1,284,629,379	1,225,128,416	95.37
10 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	889,463,800	889,463,800	812,821,500	91.38

BAB IV PENUTUP

Secara umum pada tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan telah dapat merealisasikan target IKU RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Bappeda akan mengambil langkah – langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan agar dapat menjawab tantangan era global yang sangat dinamis.

Demikianlah uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014 yang dapat kami susun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan serta penugasan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Kami yakin bahwa dalam penyusunannya terdapat beberapa kekurangan, namun kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadikan bahan pertimbangan maupun penilaian tentang kinerja Bappeda Provinsi NTB secara keseluruhan dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Bappeda Provinsi NTB dalam pelayanan kepada publik.

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD / Unit Kerja : BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI					CAPAIAN TAHUN 2014 TERHADAP			Target 2018 (target tahun terakhir pada RPJMD)
NO	URAIAN	NO	URAIAN		2014	2010	2011	2012	2013	2014	Realisasi 2013	Target Tahun 2014	Target Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) 11:10x100%	(13) 11:6x100%	(14) 11:15x100%	(15)
1	Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik	1	Waktu tindak lanjut	Menit	30	-	-	-	-	25	-	83%	250%	10
2	Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	2	Pertumbuhan layanan sarana prasarana kantor	%	100	-	-	-	-	100	-	100%	100%	100
3	Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	3	Peralatan kantor yang terpelihara	%	100	-	-	-	-	100	-	100%	100%	100
4	Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	4	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	%	20	-	-	-	-	21%	-	1%	0%	50
5	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	5	Penyerapan anggaran	%	92	-	-	-	91,33	92,69	101%	101%	97%	96
6	Terkelolanya basis data spasial daerah	6	Penanganan data spasial daerah	%	100	-	-	-	-	100	-	100%	100%	100
7	Tersebarinya data dan informasi pembangunan berbasis web	7	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	Orang	10.000	-	-	-	-	25.096	-	251%	16%	160.000
8	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	8	Data pembangunan daerah yang diselaraskan	Data	11	-	-	-	3	11	367%	100%	100%	11
9	Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	9	Persentase usulan masyarakat dan Kab/Kota yang diakomodir dalam rencana pembangunan	%	91	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	0%	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) 11:10x100%	(13) 11:6x100%	(14) 11:15x100%	(15)
10	Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	10	Penyelesaian dokumen/laporan : - DPA SKPD - LAKIP	Bulan	Nov Jan	-	-	-		Juli Jan	-	129%	129%	Nov Jan
11	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	11	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	Dok	2	-	-	-	2	2	100%	100%	100%	2
12	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	12	Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : - KUA/PPAS - LKPJ	Bulan	Jun Mar	-	-	-	Jun Mar	Jun Mar	100%	100%	100%	Jun Mar
12	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	13	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	%	90	-	-	-	90	90	100%	100%	100%	90
13	Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	14	Persentase pemanfaatan SDA potensial daerah	%	100	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	100
14	Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	15	Persentase pengembangan industri daerah	%	70	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	90
15	Terwujudnya rencana pemerintah yang bersih dan melayani	16	Persentase peningkatan layanan pemerintah yang bersih	%	85	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	90
16	Tersedianya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta PMKS yang baik	17	Persentase penyediaan kebutuhan sosial dasar	%	80	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	100
17	Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua	18	Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	%	65	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) 11:10x100%	(13) 11:6x100%	(14) 11:15x100%	(15)
18	Tersedianya rencana pengelolaan hutan dan lahan	19	Persentase sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	%	18,75	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	100
19	Tersedianya rencana mitigasi dan adaptasi bencana	20	Persentase penanggulangan korban bencana	%	100	-	-	-			#DIV/0!	0%	0%	100

PENCAPAIAN KINERJA

SKPD / Unit Kerja : BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2014	PROGRAM				% CAPAIAN			
NO	URAIAN	URAIAN			URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		FISIK
			2014 (Sebelum Perubahan)	2014 (Setelah Perubahan)		2013	2014	TERHADAP TARGET TH 2013	TERHADAP TARGET TH 2014	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 10:9X100%	(12) 10:8X100%	(13)
1	Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik	Waktu tindak lanjut	Menit	30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.587.289.000	3.535.550.450	3.078.757.076	3.309.180.387	107%	93,60%	100%
2	Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	Pertumbuhan layanan sarana prasarana kantor	%	100	1 Penyediaan jasa surat menyurat	14.300.000	14.300.000	8.024.300	14.266.950	178%	99,77%	100%
					2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	485.500.000	467.900.000	409.735.376	421.849.119	103%	90,16%	100%
					7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.000.000	129.636.000	83.979.100	127.529.250	152%	98,37%	100%
					8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	191.447.500	210.897.500	124.896.500	207.817.500	166%	98,54%	100%
					10 Penyediaan alat tulis kantor	27.000.000	27.000.000	14.214.500	27.000.000	190%	100,00%	100%
					11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.100.000	20.100.000	14.431.100	17.345.000	120%	86,29%	100%
					12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.313.500	39.228.950	6.920.250	38.781.200	560%	98,86%	100%
					13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.800.000	107.900.000	223.064.500	94.372.500	42%	87,46%	100%
					17 Penyediaan makanan dan minuman	110.000.000	110.000.000	53.605.700	88.109.000	164%	80,10%	100%
					18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600.000.000	519.560.000	454.809.300	488.976.648	108%	94,11%	100%
					19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	1.818.828.000	1.819.028.000	1.626.853.450	1.713.433.000	105%	94,19%	100%
					20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	133.000.000	70.000.000	58.223.000	69.700.220	120%	99,57%	100%
3	Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	Peralatan kantor yang terpelihara	%	100	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.158.010.000	2.639.210.000	1.008.560.209	2.204.840.946	219%	83,54%	100%
					5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.025.000.000	978.500.000	263.500.000	942.830.500	358%	96,35%	100%
					22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	475.000.000	992.500.000	207.587.550	700.612.100	338%	70,59%	100%
					24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	421.160.000	431.360.000	503.069.147	381.490.946	76%	88,44%	100%
					26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	189.350.000	189.350.000	23.156.512	158.140.400	683%	83,52%	100%
					30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	47.500.000	47.500.000	11.247.000	21.767.000	194%	45,83%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 10:9X100%	(12) 10:8X100%	(13)
4	Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	%	20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4 Pembinaan mental dan fisik aparat	245.090.000	198.590.000	115.678.500	142.281.500	123%	71,65%	100%
5	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	Penyerapan anggaran	%	92	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	20.000.000	12.657.250	19.459.050	154%	97,30%	100%
6	Terkelolanya basis data spasial daerah	Penanganan data spasial daerah	%	100	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	422.000.000	368.400.000	309.016.020	255.764.500	83%	69,43%	100%
7	Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	Orang	10.000	1 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 5 Penyusunan Profile Daerah	223.000.000	203.000.000	224.970.620	141.883.950	63%	69,89%	100%
8	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Data pembangunan daerah yang diselenggarakan	Data	11	Program kerjasama pembangunan 3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1.315.402.072	1.289.002.072	355.181.000	1.288.024.900	363%	99,92%	100%
9	Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Persentase usulan masyarakat dan Kab/Kota yang diakomodir dalam rencana pembangunan			Program perencanaan pembangunan daerah	3.764.523.051	3.651.511.601	3.380.136.100	3.408.483.115	101%	93,34%	100%
10	Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Penyelesaian dokumen/laporan : - DPA SKPD - LAKIP	Bulan	Nov Jan	1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1.033.146.306	1.108.606.050	716.880.400	993.094.500	139%	89,58%	100%
11	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : - KUA/PPAS - LKPI	Dok	2	8 Penyusunan Rancangan RKPD 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	217.867.500	238.382.500	73.415.000	235.288.400	320%	98,70%	100%
12	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	%	90	11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35.600.000	35.600.000	24.985.000	35.546.000	142%	99,85%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 10:9X100%	(12) 10:8X100%	(13)
					12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	195.500.000	195.500.000	272.600.000	184.248.000	68%	94,24%	100%
					13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	304.405.000	304.405.000	101.831.700	273.710.900	269%	89,92%	100%
					14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	186.877.000	186.877.000	150.720.000	184.801.200	123%	98,89%	100%
					15 Penyusunan Dokumen Perencanaan	302.387.045	335.272.651	577.369.000	333.371.215	58%	99,43%	100%
					16 Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60.500.000	60.500.000	63.260.000	29.895.000	47%	49,41%	100%
					21 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	349.210.400	316.695.400	25.534.600	308.400.500	1208%	97,38%	100%
					22 Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	145.464.000	157.464.000	-	153.129.000	-	97,25%	100%
13	Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	Persentase pemanfaatan SDA potensial daerah	%	100	Program perencanaan pembangunan ekonomi	695.187.198	615.187.198	681.353.750	602.582.350	88%	97,95%	100%
14	Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	Persentase pengembangan industri daerah	%	70	3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	283.131.312	283.131.312	317.126.750	279.574.450	88%	98,74%	100%
					4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	332.055.886	332.055.886	364.227.000	323.007.900	89%	97,28%	100%
15	Terwujudnya rencana pemerintah yang bersih dan melayani	Persentase peningkatan layanan pemerintah yang bersih	%	85	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	714.814.000	634.814.000	515.767.200	559.624.800	109%	88,16%	100%
16	Tersedianya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta PMKS yang baik	Persentase penyediaan kebutuhan sosial dasar	%	80	5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	161.444.054	161.444.054	169.644.300	134.564.350	79%	83,35%	100%
					8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	473.369.946	473.369.946	346.122.900	425.060.450	123%	89,79%	100%
17	Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua	Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	%	65	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2.411.571.179	2.381.621.179	1.534.572.150	2.242.684.409	146%	94,17%	100%
18	Tersedianya rencana pengelolaan hutan dan lahan wilayah	Persentase sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	%	18,75	7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	207.528.000	207.528.000	500.691.700	204.734.493	41%	98,65%	100%
19	Tersedianya rencana mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penanggulangan korban bencana	%	100	8 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	1.234.629.379	1.284.629.379	740.448.000	1.225.128.416	165%	95,37%	100%
					10 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	889.463.800	889.463.800	293.432.450	812.821.500	277%	91,38%	100%

LAPORAN PENDUKUNG LAKIP 2014

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

SKPD / Unit Kerja : BAPPEDA PROVINSI NTB

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		%CAPAIAN		PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		% CAPAIAN		% FISIK
		2013	2014	2013	2014	TERHADAP TH 2013	TERHADAP TARGET TH 2014		2013	2014	2013	2014	TERHADAP TH 2013	TERHADAP TARGET TH 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 6:5X100%	(8) 6:4X100%	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) 13:12X100 %	(15) 13:11X100 %	(16)
Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	-	10,000 org	-	25,096 org	-	251%	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	309.016.020	309.016.020	255.764.500	-	82,77%	100%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	-	2 dok	-	2 dok	-	100%	Program perencanaan pembangunan daerah	-	3.651.511.601	3.380.136.100	3.408.483.115	-	93,34%	100%

b. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

NTB Satu Data atau Bale Ite baru diresmikan pada tanggal 10 September 2014, masyarakat dapat mengakses data terkini mengenai perencanaan pembangunan NTB melalui website Bappeda Provinsi NTB dengan aplikasi yang terdapat didalam website tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan prestasi pada tingkat nasional dalam menyusun dokumen perencanaan, Bappeda berupaya untuk menelaraskan penyusunan perencanaan pembangunan dengan Perda RPJMD dan RPJPD yang ada serta menyelesaikan proses perencanaan tersebut tepat pada waktunya.

c. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Permasalahan
-	-	-

d. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Foto piagam penghargaan